

NOTULEN RAPAT

23/04/2018
11:00-16:00 WIB
Hotel Pullman - Jakarta

Rapat diselenggarakan oleh:	INOBU & EFI
Jenis Rapat:	Tatap muka, Seminar
Moderator:	Bernadinus Steni
Pencatat:	Dian Mayasari
Peserta:	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Delegasi UE, Pemerintah Kabupaten Seruyan, KEHATI, LTKL, RSPO, FoKSBI/UNDP, IDH, Aliansi Hutan Tropis, CPOPC, SPKS, PT Bentang Alam Indonesia, World Resource Institute, SETARA JAMBI, IFC, Global Canopy/Trase, Madani, HUMA, AMAN, Unit Perubahan Iklim Inggris, GIZ, Kedutaan Besar Denmark, Kedutaan Besar Perancis, Unilever

Rangkuman Pertemuan

Seminar dihadiri oleh 41 peserta yang mewakili beragam kelompok pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, serta produsen dan pembeli (*buyer*) komoditas.

Seminar dibagi menjadi tiga sesi. Pertama, seminar dibuka secara resmi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Delegasi Uni Eropa (UE). Kedua kontraktor yang melakukan studi lintas diperkenalkan, yaitu European Forestry Institute (EFI) dan Inovasi Bumi (INOBU), kemudian dilanjutkan dengan presentasi studi "Terpercaya". Selama sesi kedua, presentasi disajikan Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri. Sesi ketiga menyediakan ruang untuk diskusi terbuka dan peserta didorong untuk memberikan masukan awal terhadap studi ini. Rangkuman presentasi dan diskusi pada setiap sesi disajikan di bawah ini.

Sesi pertama

Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ibu Ir. Musdhalifah Machmud, MT) secara resmi membuka pertemuan setelah memberikan sambutan sebagai berikut:

- Kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama di Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sekitar 14 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan 17,5 juta pekerja di sektor kelapa sawit. Kementerian percaya bahwa komoditas ini dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG), sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap agenda internasional. Kontribusi ini berlaku terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang sangat terbatas.
- Mengingat pentingnya sektor kelapa sawit, Studi "Terpercaya" akan sangat penting dalam menginformasikan upaya meningkatkan praktik dan kebijakan dalam mempromosikan produksi sawit berkelanjutan. Kementerian Koordinator mengapresiasi studi ini dan berharap dapat mempromosikan tata kelola yang lebih baik untuk minyak sawit berkelanjutan dan terlacak. Semoga, sebagai respon, Uni Eropa akan sanggup menerima kelapa sawit Indonesia yang dapat dilacak dan dipercaya.
- Tekanan untuk moratorium konsesi kelapa sawit yang baru masuk akal karena Indonesia sudah memiliki sejumlah besar perkebunan. Akan tetapi, untuk mengejar hal ini, pemerintah perlu membangun sumber daya ekonomi baru bagi masyarakat miskin dan masyarakat umum dengan, misalnya, mencari komoditas alternatif yang dapat tumbuh di hutan. Diversifikasi tanaman itu penting. Dukungan internasional yang mempromosikan produksi komoditas tersebut di Indonesia disambut baik.

- Kita seharusnya tidak menilai buruk para pelaku di sektor ini; studi yang solid tentang keterlaksanaan dan solusi pelacakan dengan tahapan dan langkah yang jelas, sungguh merupakan hal yang kita butuhkan.

Bpk. Michael Bucki, atas nama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, memberikan sambutan pembukaan sebagai berikut:

- Studi 'Terpercaya', yang merupakan komponen 2 dari pekerjaan yang didanai UE tentang 'Mendefinisikan dan melacak sawit bebas deforestasi'¹, bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang keberlanjutan kelapa sawit dan menginformasikan dialog UE-Indonesia tentang perubahan iklim dan lingkungan hidup.
- Komisi Eropa sangat menyadari aspek sosial-ekonomi kelapa sawit di Indonesia. Pada aspek lingkungan, terdapat konsep berbeda tentang deforestasi; definisi deforestasi legal di Indonesia tidak mengejutkan apa yang dicari banyak konsumen. Tingkat emisi referensi kawasan hutan disebutkan dalam diskusi UNFCCC dan tidak terbantahkan di sini bahwa ada tingkat deforestasi tertentu yang dapat diterima; hanya saja konsepnya tidak sepenuhnya dipahami; dan beberapa menganggap hanya deforestasi ilegal yang dianggap sebagai deforestasi, sementara yang lain menganggap deforestasi mencakup semua deforestasi biofisik.
- Tidak ada cetak biru UE yang mendefinisikan 'keberlanjutan' dalam konteks ini. Keberlanjutan perlu didefinisikan oleh Indonesia, yang bersama dengan banyak negara lain adalah penanda tangan Perjanjian Paris, dan komitmen terkait perubahan iklim lainnya. Oleh karena itu, terdapat pengakuan atas kesatuan tujuan dan kerja sama meraih tujuan terkait perubahan iklim.
- Hari ini adalah peluncuran Studi "Terpercaya". Kata "Terpercaya" berarti 'dapat dipercaya' dalam bahasa Indonesia dan menyatakan tujuan penelitiannya, membangun dan memperkuat rasa percaya dan berbagi pemahaman tentang dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari produksi dan perdagangan sawit. Studi ini diharapkan akan menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan yang tertarik untuk bertanya dan memperdebatkan isu-isu penting. 'Terpercaya' bukan hanya tentang kelapa sawit, tetapi juga tentang mengatasi semua faktor pendorong deforestasi. Studi ini akan meninjau standar dan data yang ada untuk melihat cara bergerak mengatasi pemicu deforestasi dan menuju keberlanjutan. Studi ini pun akan melibatkan sisi permintaan pada tahap selanjutnya.
- Studi ini bukan mengenai pengumpulan data baru atau penetapan standar baru, melainkan mengenai data dan standar yang ada. Studi ini bertujuan untuk berbagi teknik dan membangun konsensus tentang definisi keberlanjutan. Studi ini menciptakan peluang bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari petani kecil, dunia usaha hingga *buyer* untuk membangun pemahaman bersama tentang pilihan-pilihan. Kami tidak punya jawabannya; jawabannya harus dari bangsa Indonesia agar memastikan kepemilikan nasional tercipta.
- Lokakarya ini adalah langkah pertama dan dalam tindak lanjutnya, kami berupaya membentuk kelompok yang lebih kecil untuk bertindak sebagai Komite Penasihat yang memandu kerja, memberikan narasi, menyumbangkan analisis, dan mensosialisasikan berbagai pesan ke Indonesia dan dunia.

Pengantar European Forest Institute yang dipresentasikan oleh Dr. Jeremy Broadhead

- European Forest Institute (EFI) adalah organisasi internasional, didirikan oleh negara-negara Eropa, dengan anggota organisasi-organisasi penelitian di 36 negara. EFI melakukan penelitian dan dukungan kebijakan terkait hutan. Delegasi Uni Eropa telah membiayai sebuah studi berjudul 'Mendefinisikan dan melacak kelapa sawit "bebas deforestasi"' - analisis rantai pasok dan peluang untuk

¹ Kedua studi ('Analisis Rantai Pasok' dan 'Studi Analisis dan Penjangkauan Pemangku Kepentingan') terdiri dari komponen 1 dan 2 dari proyek yang didanai UE 'Mendefinisikan dan melacak kelapa sawit "bebas deforestasi" - analisis rantai pasok dan peluang untuk verifikasi berbasis wilayah.

verifikasi berbasis wilayah'. Studi yang dilakukan dari Februari 2018 sampai dengan Mei 2019 ini memiliki dua komponen. Komponen pertama adalah Analisis Rantai Pasok yang dilakukan oleh konsorsium Trase dari Stockholm Environment Institute dan Global Canopy. Komponen kedua adalah melakukan studi analisis dan penjangkauan pemangku kepentingan di mana EFI menjadi kontraktor utama dan INOBU akan berfokus pada keterlibatan dan penjangkauan pemangku kepentingan serta analisis pendekatan yurisdiksi.

Sesi pertama diakhiri dengan presentasi studi "Terpercaya" oleh Bpk. Thomas Sembres [lihat presentasi yang diedarkan setelah seminar].

- Thomas Sembres memberikan presentasi khusus mengenai komponen kedua dalam studi tentang "Mendefinisikan dan melacak kelapa sawit "bebas deforestasi". Poin-poin utama dijelaskan di bawah ini:
 - Tujuan studi ini adalah melacak kelapa sawit berkelanjutan dan mendefinisikan keberlanjutan yurisdiksi berdasarkan skala.
 - Saat ini, kelapa sawit sangat menarik perhatian dan terdapat minat cukup besar di antara berbagai pelaku terkait informasi berkualitas dan analisis dengan nuansa untuk mengurangi biaya pemantauan di sektor tersebut. Sistem operasional pemantauan dan verifikasi yang dapat dipercaya semua pihak sangat dibutuhkan.
 - Di luar kelapa sawit, studi "Terpercaya" bertujuan untuk memberikan visibilitas yang lebih tinggi bagi kabupaten dan provinsi yang membuat kemajuan menuju keberlanjutan yurisdiksi. Hal ini termasuk visibilitas pasar untuk menarik *buyer* dan investor yang bertanggung jawab dan visibilitas dalam agenda pembangunan berkelanjutan untuk "menarik" dukungan nasional dan internasional sehubungan dengan pencapaian target TPB dan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC), dsb.

Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

- Mengenai akurasi data rantai pasok, pertanyaan penelitiannya adalah: "Apakah mungkin untuk melacak kinerja sawit berkelanjutan dan keberlanjutan yurisdiksi di seluruh Indonesia dalam 12-18 bulan ke depan? Seberapa jauh itu bisa diandalkan?"
- Mengenai informasi kawasan atau yurisdiksi, di mana tantangannya adalah pemahaman bersama, pertanyaan penelitiannya adalah: "Mungkinkah mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan yang berbeda tentang indikator terbaik untuk mengukur kinerja yurisdiksi? Apakah indikator-indikator tersebut dapat diterima dan layak untuk melacak keberlanjutan kelapa sawit?"

Sesi Kedua

Presentasi pertama dari sesi kedua dibawakan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan tentang "Persepsi Pemerintah Daerah" terhadap keberlanjutan yurisdiksi.

- Seruyan adalah satu-satunya kabupaten dari 14 kabupaten di Kalimantan Tengah yang dikategorikan kurang berkembang meskipun terdapat banyak perusahaan kelapa sawit di kabupaten tersebut.
- Kabupaten Seruyan mencakup 1,6 juta hektar di mana 20% merupakan kawasan konservasi dan 80% lainnya diklasifikasikan sebagai kawasan produktif, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Di bawah kepemimpinan Bupati saat ini, tidak ada konsesi kelapa sawit baru yang dikeluarkan, karena fokusnya pada pemberdayaan masyarakat setempat dengan berpartisipasi dalam perekonomian. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama, melestarikan lingkungan hidup.
- Pemerintah kabupaten menyadari permintaan pasar untuk keberlanjutan dalam produksi komoditas pertanian. Mereka juga melihat bahwa transisi menuju praktik berkelanjutan adalah suatu keharusan.
- Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Seruyan dalam meraih keberlanjutan meliputi:
 - Pembentukan Kelompok Kerja untuk sertifikasi berbasis yurisdiksi yang melibatkan perusahaan kelapa sawit, perwakilan petani kecil, masyarakat sipil, dan pemerintah kabupaten. Kelompok Kerja memiliki

tujuan untuk mengidentifikasi solusi masalah keberlanjutan, misalnya deforestasi, perusakan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV), kebakaran hutan dan konflik sosial.

- Pemetaan 60% petani kecil di Seruyan. Data telah terintegrasi dalam sistem pemantauan perkebunan disebut SIPKEBUN. Melalui data referensi geografis yang disimpan di SIPKEBUN, pemerintah kabupaten memiliki akses mudah untuk informasi tentang petani swadaya, data statistik, dan analisis untuk sektor perkebunan, dasar informasi perusahaan termasuk Penilaian Sektor Usaha Perkebunan, kondisi kinerja lingkungan seperti seperti kebakaran, deforestasi, lahan kritis, dan kepatuhan hukum.
- Pembentukan Fasilitas Pertanian. Fasilitas akan memberikan pelatihan, akses ke input pertanian, dan mendanai petani kecil yang beralih ke praktik berkelanjutan. Fasilitas ini bertujuan untuk menawarkan pelatihan bagi 4.000 petani kecil dan untuk menerbitkan sertifikasi setidaknya bagi 1.200 petani kecil (20% dari total petani kecil Seruyan) pada 2020.
- Penerbitan surat keputusan tentang penentuan area NKT dalam perkebunan. Keputusan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk melestarikan kawasan NKT yang biasanya dianggap sebagai lahan terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Mengembangkan prosedur operasi standar (SOP) tentang pencegahan dan penyelesaian konflik untuk menghilangkan konflik dari rantai pasok.

Presentasi kedua dibawakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian tentang “Standar Sosial dan Ekonomi dalam Produksi Komoditas”:

- Undang-Undang No. 39/2014 tentang Perkebunan adalah dasar untuk operasi kegiatan perkebunan di negara ini. Hukum mengatur semua kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengoperasian perkebunan berdasarkan skala: tingkat komersial atau skala kecil (petani). Undang-undang ini telah dirinci lebih lanjut dengan dikeluarkannya berbagai peraturan Menteri tentang tanggung jawab lingkungan dan sosial dari operasi skala besar dan kecil. Saat ini, peraturan pemerintah tentang perkebunan sedang disusun.
- Pasal 62 UU mensyaratkan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan. Keberlanjutan terdiri dari tiga aspek: aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Khusus untuk kelapa sawit, terdapat Peraturan Menteri tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) untuk operasi skala besar dan kecil. Petani atau operasi skala kecil dapat memperoleh sertifikasi melalui kelompok petani kecil.
- Direktorat Jenderal Perkebunan memuji studi “Terpercaya”. Masukan untuk studi ini juga harus mengeksplorasi tingkat yurisdiksi di bawah kabupaten, yakni tingkat desa. Tingkat desa lebih dekat dengan petani kecil dan langsung dukungan dapat diberikan oleh pemerintah desa kepada petani. Undang-Undang tentang Desa Indonesia juga telah memberikan mandat dan sumber daya bagi pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat setempat. Namun, itu menjadi tantangan karena ada sekitar 74.000 desa (dan 514 kabupaten).
- Studi ini juga harus mempertimbangkan insentif bagi kabupaten yang memelihara hutan mereka untuk konservasi daripada mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Presentasi ketiga dibawakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mempromosikan Keberlanjutan”:

- UU 32/2009 tentang Lingkungan menetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan berada di bawah wewenang berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah kabupaten. Perundang-undangan bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan melalui perencanaan lingkungan yang tepat dan eksploitasi rasional serta pengembangan menggunakan alat yang berbeda sebagai cara untuk mengendalikan dan mencegah degradasi lingkungan.
- Perlindungan dan manajemen lingkungan harus direncanakan dengan melalui fase-fase berikut: inventarisasi sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang ada; penunjukan ekoregion; dan perumusan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- Kementerian mencatat bahwa semua distrik harus menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan, lingkungan memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa lingkungan termasuk untuk penyediaan air bersih, pencegahan bencana, konservasi keanekaragaman hayati dan lainnya. Dengan memperkirakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebuah kabupaten atau provinsi dapat memutuskan berapa banyak pembangunan yang harus diizinkan sebelum batas atas daya dukung dan daya tampung lingkungan tercapai. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan kerja sama dengan yurisdiksi lain, terutama jika mereka bergantung pada lingkungan kabupaten atau provinsi tetangga.
- Kementerian saat ini menghadapi tantangan dalam menegakkan penerapan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), yang bertindak sebagai alat pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan hidup. KLHS diperlukan untuk perumusan kebijakan utama pemerintah, rencana pembangunan, dan rencana tata ruang. Saat ini, dari total 269 pemerintah daerah yang diwajibkan untuk mengembangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), hanya 110 yang melakukannya. Hanya 10% dari KLHS yang telah selesai, namun, memenuhi persyaratan standar. Pada 2019, Kementerian mungkin hanya dapat menyediakan bimbingan teknis kepada 25% dari 400 total wilayah yang meminta bantuan teknis. Hanya terdapat kurang dari 50 pakar tentang KLHS dan sebagian besar dari mereka berbasis di Jawa.
- Kementerian menargetkan 500 pemerintah daerah untuk merumuskan KLHS pada 2019 dan memastikan 100% dari KLHS yang rampung memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pihaknya juga berharap agar mampu memberikan panduan teknis yang diperlukan untuk semua pemerintah daerah, dan untuk membangun sumber daya manusia dan sistem informasi yang diperlukan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Presentasi keempat disajikan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tentang "Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Keberlanjutan"

- Demi memastikan keberlanjutan yurisdiksi, seseorang harus merujuk pada pihak berwenang yang disediakan pemerintah daerah. Wewenang pemerintah daerah dalam tatanan desentralisasi diatur secara rinci oleh UU No. 23/2014. Pemerintah pusat atau kementerian di sektor masing-masing harus mengeluarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk setiap wewenang dan fungsi yang dilimpahkan ke tingkat daerah. NSPK dapat menjadi alat (pemantauan) yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mematuhi kebijakan dan target nasional. Jika sertifikasi untuk minyak kelapa sawit merupakan target penting, Kementerian Pertanian dapat merumuskan NSPK untuk mengatur peran, fungsi, dan amanat pemerintah daerah dalam mendukung proses sertifikasi.
- Kementerian menghargai studi yang diajukan. Hasil studi dapat memberikan informasi bagi Kementerian untuk menjelaskan pembagian peran dan wewenang terkait kegiatan pertanian berkelanjutan. Dalam melakukan studi, UU No. 23/2014 harus dipertimbangkan. Wewenang dan peran pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan bukan pada komoditas (Pasal 407). Mengenai sertifikasi yurisdiksi, penting untuk mengeksplorasi: a) standar khusus yang dapat ditetapkan bagi pemerintah daerah untuk mendukung produksi sawit berkelanjutan; dan b) peran pemerintah daerah secara khusus dalam mencapai produksi sawit berkelanjutan.

Sesi ketiga

Selama sesi diskusi, intervensi dilakukan oleh beberapa peserta. Intervensi dirangkum di bawah ini berdasarkan topiknya.

- Terminologi yang digunakan dalam studi ini. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyarankan agar makna istilah "yurisdiksi" dan "keberlanjutan yurisdiksi" harus diklarifikasi sehingga para pemangku kepentingan memiliki kejelasan pemahaman mengenai studi. Mendapatkan definisi bersama dan operasional mengenai keberlanjutan yurisdiksi adalah apa yang sungguh ingin dicapai Terpercaya selama masa studi. Karena beragamnya terminologi dan akronim yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia, Delegasi UE menyarankan pentingnya penyusunan kosa kata untuk semua terminologi yang digunakan dalam studi untuk mencegah kebingungan.

- Wewenang dan peran. Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar studi ini memperhatikan peran dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten) dalam sertifikasi dengan mempertimbangkan undang-undang, peraturan, dan NSPK terkait. Pendekatan yurisdiksi tergantung pada undang-undang yang mengatur wewenang masing-masing tingkat pemerintah. Saat ini, tidak ada kejelasan mengenai peraturan terkait ISPO tentang peran pemerintah daerah. Mengingat pembagian wewenang dan peran yang tidak jelas antara pemerintah pusat dan daerah terkait sertifikasi, studi ini mungkin dapat menawarkan rekomendasi terkait.
- Mengeksplorasi sistem yang ada. IDH menyarankan agar studi ini mengumpulkan informasi tentang pelaporan sistem saat ini yang dilaksanakan oleh kabupaten sehingga studi tidak mengembangkan sistem baru yang mungkin tidak layak dilakukan pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan pentingnya untuk mempertimbangkan kebijakan Satu Peta.
- Pendekatan multi pemangku kepentingan. Platform Kabupaten Berkelanjutan LTKL menyarankan agar studi ini harus melibatkan pemerintah, petani kecil, dan pelaku pasar. Pemerintah harus dilibatkan sejak tahap awal. Selain itu, IDH menyarankan bahwa sertifikasi yurisdiksi harus memenuhi harapan pemerintah dan sektor swasta.
- Sertifikasi Yurisdiksi RSPO. RSPO sedang mempersiapkan sistem sertifikasi yurisdiksi; dan diperkirakan proyek percontohan tersebut akan diluncurkan di beberapa daerah pada 2019; RSPO berbagi informasi tentang inisiatifnya untuk membangun sistem Sertifikasi Yurisdiksi di mana RSPO ingin menekankan bahwa RSPO tidak akan berusaha untuk mengatur peran pemerintah. Pengaturannya adalah sebagai berikut:
 - Sistem Sertifikasi Yurisdiksi RSPO yang diusulkan adalah pendekatan multi-pemangku kepentingan. Pemerintah, perusahaan, dan petani kecil setuju untuk bersama-sama menyatakan bahwa yurisdiksi tersebut berkelanjutan. Berbagai pemangku kepentingan membuat pengaturan dan peran semua pihak didelegasikan dengan jelas. Jika peraturan perlu direvisi, pemerintah akan menjalankan peran ini.
 - Pembiayaan: Selain anggaran pemerintah daerah, masih dipertimbangkan sumber pendanaan lain yang perlu dicari.
 - Sertifikasi yurisdiksi tidak mengesampingkan sertifikasi lain yang disyaratkan oleh RSPO. Pada akhirnya, sertifikasi akan terbatas pada satu komoditas; tetapi juga dapat mencakup komoditas lainnya. Akan tetapi, penting untuk memprioritaskan komoditas yang hendak dibangun pemangku kepentingan dalam sistem sertifikasi. Poin utama mengenai Sertifikasi Yurisdiksi RSPO adalah bahwa pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung sistem.
- Dinamika politik dan hubungan di antara para pemangku kepentingan yang berbeda. SPKS menyarankan agar studi ini perlu membahas kekuatan politik daerah, posisi perusahaan swasta, dan cara-cara pemerintah kabupaten dapat menegakkan hukum dan melibatkan perusahaan swasta.
- Insentif. SPKS menyarankan agar studi ini mengeksplorasi insentif untuk petani kecil dan perusahaan yang mematuhi peraturan. Organisasi tersebut menyatakan bahwa dalam hal insentif dan kesejahteraan masyarakat, pendekatan desa mungkin berarti bahwa insentif berdampak lebih besar pada masyarakat. LTKL juga menekankan pentingnya insentif untuk yurisdiksi daerah dan menyebutkan kemungkinan adanya forum investasi.
- Format. Delegasi Uni Eropa menyarankan cara untuk mempresentasikan kekayaan informasi yang dihasilkan studi tersebut dapat dipahami tidak hanya oleh para pakar di Jakarta atau di area produksi, tetapi juga oleh mereka yang berada di luar negeri. Ketiga dimensi perlu dipertimbangkan dalam laporan akhir.
 - Pertama, skala atau tingkat yurisdiksi - berfokus pada bagaimana tingkat-tingkat yang berbeda harus bekerja sama (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten).
 - Kedua, untuk setiap skala, terdapat beberapa komponen keberlanjutan. Komponen pertama adalah sosial dimensi termasuk nilai, konsultasi, pendaftaran, hak, dan elit sosial. Komponen kedua adalah

komponen ekonomi (seperti penetapan harga yang adil). Komponen ketiga terkait masalah lingkungan seperti pemetaan deforestasi, NKT, stok karbon tinggi (SKT/HCS) dan lainnya.

- Ketiga, untuk setiap tingkat dan komponen, ada pertanyaan utama yang harus didiskusikan, termasuk: Siapa yang berwenang untuk menetapkan norma dan aturan? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana ini ditegakkan oleh masing-masing bagian? Bagaimana ini dijadikan terpusat?
- Data dan pengumpulan data. Karena studi ini mungkin perlu mengumpulkan informasi resmi pemerintah, TFA menyarankan bahwa studi ini mungkin perlu mendapatkan amanat dari pemerintah dan lembaga terkait. Semoga pemerintah akan memberikan dukungan dan amanat untuk melakukan studi. SPKS menambahkan, studi ini perlu memiliki data tentang petani kecil (jumlah total, lokasi, dll).
- Keterlibatan dari Masyarakat Adat. AMAN menyarankan pentingnya mengumpulkan informasi tentang cara lahan dibebaskan pada saat pendirian perkebunan kelapa sawit. Dengan mengetahui bagaimana awalnya tanah diperoleh, eksploitasi dan kerugian atau penyalahgunaan hak-hak masyarakat adat dapat diidentifikasi.
- Konteksnya spesifik. KEHATI menyarankan agar pendekatan yurisdiksi harus berfokus pada kesejahteraan yurisdiksi. Karenanya, pemetaan bentang alam dan potensi yurisdiksi beralih menuju keberlanjutan sangat penting. Kementerian Pertanian menyebutkan pentingnya mempertimbangkan kepadatan penduduk untuk memotret kondisi antar kabupaten yang sangat berbeda.
- Dimasukkannya perkebunan besar. KEHATI menyarankan agar sertifikasi yurisdiksi tidak terbatas pada petani kecil tetapi juga perlu memasukkan perkebunan besar.
- Koneksi dengan agenda pembangunan global. KEHATI menyarankan agar studi ini membangun koneksi antara pendekatan 'Terpercaya' dengan sasaran TPB.
- Kolaborasi. GIZ bertanya mengenai pihak-pihak yang akan terlibat dalam studi 'Terpercaya' dan kemungkinan kolaborasi itu bisa terjadi.

Langkah berikutnya

Ringkasan langkah-langkah selanjutnya disajikan sebelum pertemuan ditutup secara resmi oleh Delegasi UE. Jadwal untuk studi ini adalah sebagai berikut [lihat presentasi yang diedarkan setelah seminar]:

- Akhir Juni/awal Juli: Draf pertama panduan praktis akan diedarkan ke Komite Penasihat untuk mendapatkan masukan.
- Awal Juli: diskusi kelompok terfokus (FGD) Komite Penasihat.
- Awal Oktober: Draft pertama metrik akan diedarkan dalam Komite Penasihat untuk mendapatkan masukan.
- Pertengahan Oktober: Diskusi kelompok terfokus (FGD) Komite Penasihat.
- Akhir November: Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan audiens yang lebih besar.
- Kuartal pertama 2019: Laporan akhir diedarkan bagi audiens yang lebih luas untuk mendapatkan komentar.

Semua peserta seminar diundang untuk menyatakan minat mereka agar menjadi bagian dari Komite Penasihat melalui surat elektronik.

LAMPIRAN I

DAFTAR PESERTA SEMINAR TERPERCAYA

No.	Nama	Organisasi
1	Drs. Haryono, M. M	Pemda Seruyan
2	Sugian Noor, S. Pt, S. E., M. P.	Pemda Seruyan
3	Ade Ferdiansyah	Yayasan SETARA Jambi
4	Mardaani, S. T.	AMAN Kotawaringin Barat
5	Shepherd Muchuru	UNDP
6	Hermawati Widya P	WRI Indonesia
7	Telci B. Karacan	Kedutaan Besar Denmark
8	Michael Bucki	Delegasi Uni Eropa
9	Yuliana Suliyanti	GIZ
10	Terrenoire Helene	Economic Desenteur – Kedutaan Besar Perancis
11	Reza Ariesca	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12	Nurdiana Darus	Landscape Indonesia
13	Paul Eastwood	DFID
14	Giorgio Indrarto	Madani
15	Triyanto Fitriyardi	IFC
16	Agung Wibowo	HUMA
17	Adhi Solahuddin	Global Canopy/Trase
18	Diah Suradireja	KEHATI
19	Nizar Zulkarnaen	Hatfield
20	Thomas Sembres	EFI
21	Aisyah Sileuw	KEHATI
22	Alexandra Lehmann	EU Delegation
23	Lucius Dinto	Unilever
24	Sasmita Nugroho	Ministry of Environment an Forestry
25	Musdalifah Machmud	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Annisa R. H	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
27	Gita Syahrani	LTKL
28	Iman YF	CPOPC
29	Edison Siagian	Kementerian Dalam Negeri
30	Eva Naranty	Kementerian Dalam Negeri
31	Puji	Kementerian Dalam Negeri
32	Tiur Rumondang	RSPO
33	Erwin Widodo	TFA
34	Reuben Blackie	IDH
35	Mansuetus Darto	SPKS
36	Silvia Irawan	INOBU
37	Ofra Shinta Fitri	INOBU
38	Dian Mayasari	INOBU
39	Jeremy Broadhead	EFI
40	Thomas Sembres	EFI
41	Nita Roshita	INOBU

LAMPIRAN II

AGENDA

Waktu	Program	Pembicara/Moderator
11.30 - 12.00	Registrasi	
12:00 - 13:00	Makan Siang	
13.00 - 13.10	Sambutan pembukaan oleh Delegasi Uni Eropa	Michael Bucki, EU Counselor CC&E
13.10 - 13.20	Kata sambutan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Ir. Musdhalifah Machmud, MT
13.20 - 13.40	Presentasi: Studi "Terpercaya"	Thomas Sembres, Jeremy Broadhead dan Bernadinus Steni
13.40 - 13.55	Persepsi pemerintah daerah	Sekda Kabupaten Seruyan - Haryono, MM
13.55 - 14.10	Standar sosial dan ekonomi dalam produksi komoditas	Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan - Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M. Sc.
14.10 - 14.25	Tanggung jawab pemerintah dalam mempromosikan keberlanjutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sasmita Nugroho, S. E.
14.25 - 14.40	Memantau kinerja pemerintah daerah terkait keberlanjutan	Kementerian Dalam Negeri - Ir. Edison Siagian, M. E.
14.40 - 15.20	Sesi tanya jawab	Moderator
15.20 - 16.30	Diskusi interaktif	Moderator
16.30 - 16.35	Langkah berikutnya	Silvia Irawan
16.35 - 16.50	Kata penutup	Delegasi UE

LAMPIRAN III

FOTO

